



**RENCANA KINERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2022**

Jln. Gatot Subroto, No. 79 Pacitan

Email : dinsos@pacitankab.go.id

Telp : (0357) 881318

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	2
3. Maksud dan Tujuan	4
4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	
1 Evaluasi Pelaksanaan Renja	6
2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas	10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	12
2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial	14
3 Program dan Kegiatan	16
BAB IV PENUTUP	
Penutup	20

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunianya maka Dinas Sosial Kabupaten Pacitan telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2022 berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan ini dilakukan sebagai penjabaran rencana sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2022 seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Rencana Kinerja ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2022 dan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sehingga terwujud Pemerintahan yang baik dan bersih.

Pacitan, - - 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN**

Drs. SUNARYO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19621108 199003 1 007

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Pacitan tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial tahun 2016 - 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021.

Rencana Kerja Dinas Sosial kabupaten Pacitan tahun 2021 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Pacitan, - - 2020

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN

Drs. SUNARYO, MM

Pembina Utama Muda
NIP.196211081990031007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2022 merupakan tindak lanjut atas ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 pasal 15 ayat 1 yaitu Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan Renja diatur dalam pasal 16 ayat 2, terdiri dari (a) persiapan penyusunan, (b) penyusunan Rancangan akhir, (c) penyusunan rancangan (d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, (e) perumusan rancangan akhir, dan (f) penetapan.

Pembangunan sosial hakekatnya merupakan upaya merealisasikan amanat konstitusi yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan “pembangunan manusia seutuhnya” yang meliputi pembangunan fisik/lahiriah, sosial dan mental/batiniah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan, baik secara perorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat secara bermartabat dengan menempatkan mereka sebagai pelaku utama di dalam pembangunan. Pembangunan kesejahteraan sosial sejatinya adalah segenap strategi dan aktivitas yang dilakukan pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Secara garis besar permasalahan Sosial yang dihadapi adalah :

- 1) Masih terbatasnya akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial dasar;

- 2) Masih lemahnya penanganan korban bencana alam dan sosial;
- 3) Masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial;
- 4) Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial;
- 5) Belum serasinya kebijakan kesejahteraan sosial antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing-masing kegiatan serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan Sosial dalam satu tahun kedepan yang efektif, efisien serta profesional.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
- l. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
- w. Peraturan Bupati Pacitan Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Pacitan dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan. Selain itu, penyusunan rencana kerja Dinas Sosial tahun 2022 juga dimaksudkan sebagai penjabaran jangka pendek dari rencana strategis Dinas Sosial.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan tahun 2022 adalah sebagai bahan awal untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja, serta sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renja PD.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PKD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sampai dengan Tahun 2021 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Pacitan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Traget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021					
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1					Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	6				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	6	1	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	11	11	11	100	11	33	300
1	6	1	2.01	01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7					7	7	100
1	6	1	2.01	06	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi Perencanaan	12					12	12	100
1	6	1	2.01	07	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja	4					4	4	100
1	6	1	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan	10	10	10	10	100	10	10	100
1	6	1	2.02	01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14					14	14	100

1	6	1	2.02	05	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan keuangan akhir tahun	12					12	12	100
1	6	1	2.02	07	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan leuangan	12					12	12	100
1	6	1	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah operasional PD	12	12	12	12	100	12	12	100
1	6	1	2.06	04	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	12					12	12	100
1	6	1	2.06	05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12					12	12	100
1	6	1	2.06	09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	12					12	12	100
1	6	1	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	12					12	12	100
1	6	1	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	12					12	12	100
1	6	1	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12					12	12	100
1	6	1	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	12					12	12	100
1	6	1	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12					12	12	100
1	6	1	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan umum kantor	12					12	12	100
1	6	1	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	12					12	12	100
1	6	1	2.09	01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan pajak kendaraan	12					12	12	100
1	6	1	2.09	06	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	12					12	12	100

1	6	1	2.09	09	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	12					12	12	100
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang mendapatkan pemberdayaan								
1	6	2	2.03		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang diberdayakan	150							
1	6	2	2.03	01	Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan PSM	50					50	50	100
1	6	2	2.03	03	Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan PSKS	50					50	50	100
1	6	2	2.03	04	Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina	50					50	50	100
1	6	2	2.03	05	Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah penguatan LK3	50					50	50	100
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang dibina								
1	6	4	2.01		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia serta gelandangan dan pengemis	650					650	650	100
1	6	4	2.01	03	Sub. Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas yang dilayani dan di berdayakan	125					125	125	100
1	6	4	2.01	05	Sub. Kegiatan Pemberian	Jumlah anak bermasalah	275					275	275	100

1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Nasional	Jumlah pemeliharaan taman makam pahlawan	1						1			
1	6	7	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Nasional	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1						1			

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Dinas Sosial yang masih kurang, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kapasitas dan kompetensi SDM yang ada yang masih belum sesuai harapan dan tuntutan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.
2. Sarana dan prasarana pelayanan Sosial masih kurang memenuhi standart, baik kualitas maupun kuantitasnya. Baik gedung pelayanan sosial, sarana penunjang, dan sarana transportasi pelayanan.
3. Sistem Informasi Data Sosial yang ada belum sepenuhnya memanfaatkan tehnologi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pelaporan.
4. Anggaran pembiayaan Dinas Sosial masih sangat minim perlu ditingkatkan lagi dalam rangka pengembangan pelayanan, peningkatan kualitas SDM Sosial dan peningkatan sarana prasarana Sosial.
5. Belum optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor yang mendukung peningkatan pembangunan pelayanan sosial. Peran serta masyarakat dan dunia usaha masih perlu ditingkatkan, hal ini penting mengingat keterbatasan sumber dana pembangunan kesejahteraan sosial yang disediakan pemerintah

6. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan dan semakin berkembangnya variasi permasalahan kesejahteraan sosial, yang belum sebanding dengan kapasitas pelayanan social.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Kementerian Sosial, maka visi Kementerian Sosial adalah :

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI dan BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN NILAI dan SEMANGAT GOTONG ROYONG ”

Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Sementara kemandirian suatu bangsa tercermin pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan kemajuan pembangunannya dalam kerangka kesejahteraan penduduk; kemandirian aparatur pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas dan etos kerja sumber daya manusia; kemampuan untuk melindungi setiap

warga negara dari ketidakberdayaan dan kerentanan. Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan penduduk maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. **Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.**
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sebagai Kementerian yang mengurus bidang sosial, Kementerian Sosial akan melaksanakan 1 dari 7 misi pemerintah yaitu misi keempat :

“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”.

Peran dan fungsi Kementerian Sosial akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marginal lainnya. Hal ini dilandasi dengan semangat kegotong-royongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan kepada Kabinet Kerja, yakni :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.
9. Mempertegas ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog.

Kementerian Sosial mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam 4 agenda prioritas yaitu no 3, 5, 8 dan 9.

Terdapat dua tujuan Kementerian Sosial pada tahun 2015-2020 yaitu :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan,
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD. Sedangkan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan menjadi tujuan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah:

Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan adalah :

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD/ Tujuan Renstra	Indikator Sasaran RPJMD/Indikator Tujuan Renstra	
Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1	Persentase penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sedangkan uraian sasaran yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Pacitan pada tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a. Presentase PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Sosial tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
RANCANGAN AKHIR
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2023	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
					Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar				8.857.856.254				8.857.856.254
1.06					Sosial				8.857.856.254				8.857.856.254
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	3.857.856.254			100	3.857.856.254
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Pacitan	11	35.000.000				35.000.000
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		7	20.000.000				20.000.000
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi Perencanaan		12	15.000.000				15.000.000
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Keuangan		10	2.783.133.804				2.783.133.804
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN		14	2.748.133.804				2.748.133.804
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah koordinasi keuangan		12	35.000.000				35.000.000
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah operasioanl perangkat daerah		12	340.000.000				340.000.000
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi		12	115.000.000				115.000.000

1	06	01	2.06	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	12	25.000.000				25.000.000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD	12	200.000.000				200.000.000
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	12	65.000.000				65.000.000
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	12	65.000.000				65.000.000
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang pemerintah daerah	12	539.722.450				539.722.450
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	115.000.000				115.000.000
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12	424.722.450				424.722.450
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	12	95.000.000				95.000.000
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	12	55.000.000				55.000.000
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan	12	20.000.000				20.000.000
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	12	20.000.000				20.000.000
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			300.000.000				300.000.000
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang aktif	150	300.000.000				300.000.000
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial masyarakat yang meningkat kemampuan potensinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	50	75.000.000				75.000.000
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial	50	75.000.000				75.000.000

					Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	kelembagaan yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial						
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	50	75.000.000				75.000.000
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM LK3 yang meningkat kemampuannya	50	75.000.000				75.000.000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			3.275.000.000				3.275.000.000
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	200	1.200.000.000				1.200.000.000
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PPKS yang menerima alat bantu	35	400.000.000				400.000.000
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah PPKS yang mendapatkan bimbingan sosial	150	400.000.000				400.000.000
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	15	400.000.000				400.000.000
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS Lainnya yang mendapat bantuan	140	2.075.000.000				2.075.000.000
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan permakanan	100	2.000.000.000				2.000.000.000
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah kelompok fakir miskin yang dibina	40	75.000.000				75.000.000

1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			1.050.000.000				
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya verval DTKS	75	1.050.000.000				
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah DTKS yang terverifikasi	42892	900.000.000				
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM PKH dan Rastrada yang terfasilitasi	25000	150.000.000				
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			325.000.000				
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana		150.000.000				
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah paket makanan yang diterima oleh korban bencana	150	100.000.000				
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah paket sandang yang diterima oleh korban bencana	100	50.000.000				
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			175.000.000				
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah peserta koordinasi dan sosialisasi KSB	200	75.000.000				
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah peserta koordinasi dan sosialisasi tagana	71	100.000.000				
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			50.000.000				
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara		50.000.000				
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	1	50.000.000				
TOTAL								8.857.856.254				8.857.856.254

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Pacitan tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial tahun 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan tahun 2022 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial kabupaten Pacitan Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Pacitan, - - 2021
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN

Drs. SUNARYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621108 199003 1 007

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pacitan
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									5,827,827,087	13,350,000,000						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									3,302,827,087	5,400,000,000						
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									10,000,000	65,000,000						
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan Transparan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP >B	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	11 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	11 dokumen	10,000,000	40,000,000		
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan Transparan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP >B	Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan	12 bulan	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	11 dokumen	-	25,000,000		
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2,501,258,337	4,075,000,000		
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan Transparan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP >B	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	Tersedianya Dokumen Keuangan	10 dokumen	2,494,520,337	4,000,000,000		
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan Transparan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP >B	Jumlah koordinasi dan konsultasi keuangan	12 bulan	Tersedianya Dokumen Keuangan	10 dokumen	6,738,000	75,000,000		
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									185,066,000	415,000,000		
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya layanan publik yang inovatif	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai IKM	Baik	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	12 bulan	Terpenuhinya Operasional PD	12 bulan	57,376,000	125,000,000	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya layanan publik yang inovatif	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai IKM	Baik	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	12 bulan	Terpenuhinya Operasional PD	12 bulan	16,425,000	40,000,000	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya layanan publik yang inovatif	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai IKM	Baik	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	Terpenuhinya Operasional PD	12 bulan	111,265,000	250,000,000	
1	6	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									-	100,000,000		
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya layanan publik yang inovatif	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai IKM	Baik	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	8 unit	Terpenuhinya Operasional PD	12 bulan	-	100,000,000	
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									502,602,550	600,000,000		
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya layanan publik yang inovatif	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai IKM	Baik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	Terpenuhinya Operasional PD	12 bulan	111,642,550	150,000,000	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya layanan publik yang inovatif	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai IKM	Baik	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	Terpenuhinya Operasional PD	12 bulan	390,960,000	450,000,000	
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									103,900,200	145,000,000		

1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya layanan publik yang inovatif	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai IKM	Baik	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	12 bulan	Terpenuhinya Operasional PD	12 bulan	47,220,000	75,000,000	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya layanan publik yang inovatif	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai IKM	Baik	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan	12 bulan	Terpenuhinya Operasional PD	12 bulan	16,680,000	35,000,000	
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya layanan publik yang inovatif	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai IKM	Baik	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	Terpenuhinya Operasional PD	12 bulan	40,000,200	35,000,000	
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL										180,000,000	425,000,000	
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota										180,000,000	425,000,000	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase(%) PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	62%	Jumlah pekerja sosial masyarakat yang meningkat kemampuan potensinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 orang	PSKS yang diberdayakan	300 orang	25,000,000	100,000,000	
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase(%) PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	62%	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 orang	PSKS yang diberdayakan	300 orang	30,000,000	100,000,000	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase(%) PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	62%	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 orang	PSKS yang diberdayakan	300 orang	100,000,000	125,000,000	
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase(%) PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	62%	Jumlah SDM LK3 yang meningkat kemampuannya	50 orang	PSKS yang diberdayakan	300 orang	25,000,000	100,000,000	
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										415,000,000	5,250,000,000	
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										315,000,000	3,000,000,000	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	75.00%	Jumlah PPKS yang menerima alat bantu	35 orang	Terpenuhinya kebutuhan penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia serta gelandangan dan pengemis	200 orang	100,000,000	1,000,000,000	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	75.00%	Jumlah PPKS yang mendapatkan bimbingan sosial	150 orang	Terpenuhinya kebutuhan penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia serta gelandangan dan pengemis	200 orang	140,000,000	1,000,000,000	
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	75.00%	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	15 orang	Terpenuhinya kebutuhan penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia serta gelandangan dan pengemis	200 orang	75,000,000	1,000,000,000	

1	6	4	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial										100,000,000	2,250,000,000		
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	75.00%	Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan permakanan	2000 orang	Terpenuhinya pelayanan rehabilitasi PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza diluar panti	1700 orang	100,000,000	2,250,000,000	
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										1,750,000,000	1,675,000,000			
1	6	5	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										1,750,000,000	1,675,000,000		
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	70.00%	Jumlah DTKS yang terverifikasi	42892 RUTA	Terlaksananya verval DTKS Kabupaten Pacitan	75%	466,000,000	1,500,000,000	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	70.00%	Jumlah KPM PKH dan Rastrada yang terfasilitasi	25000 KPM	Terlaksananya verval DTKS Kabupaten Pacitan	75%	1,284,000,000	175,000,000	
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA										155,000,000	650,000,000			
1	6	6	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota										75,000,000	350,000,000		
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase korban bencana yang menerima bantuan	65.00%	Jumlah paket makanan yang diterima oleh korban bencana	150 paket	Terpenuhinya perlindungan untuk korban bencana	250 paket	75,000,000	250,000,000	
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase korban bencana yang menerima bantuan	65.00%	Jumlah paket sandang yang diterima oleh korban bencana	100 paket	Terpenuhinya perlindungan untuk korban bencana	250 paket	-	100,000,000	
1	6	6	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota										80,000,000	300,000,000		
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase korban bencana yang menerima bantuan	65.00%	Jumlah peserta koordinasi dan sosialisasi KSB	200 orang	Terlaksananya pemberdayaan terhadap kesiapsiagaan bencana	12 bulan	30,000,000	150,000,000	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase korban bencana yang menerima bantuan	65.00%	Jumlah peserta koordinasi dan sosialisasi tagana	71 orang	Terlaksananya pemberdayaan terhadap kesiapsiagaan bencana	12 bulan	50,000,000	150,000,000	
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN										25,000,000	100,000,000			
1	6	7	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										25,000,000	100,000,000		
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	1 Lokasi	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	1 lokasi	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	1 lokasi	25,000,000	100,000,000	
													TOTAL	5,827,827,087	13,350,000,000		

